

Tata Kelola Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang

Prof. Dr. Rifdan, M. Si
Dr. H. Muhammadong, M. Ag



Badan Penerbit UNM

Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang

Hak Cipta @ 2017 oleh Rifdan & Muhammadong
Hak cipta dilindungi undang-undang
Cetakan Pertama, 2017

Diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
Gedung Perpustakaan Lt. 1 Kampus UNM Gunung Sari
Jl. A. P. Petta Rani Makassar 90222
Tlp./Fax. (0411) 855 199

ANGGOTA IKAPI No. 011/SSL/2010
ANGGOTA APPTI No. 010/APPTI/TA/2011

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit
--

Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang

/ Rifdan & Muhammadong - cet. 1
Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
Makassar 2017
76 hlm; 23 cm

ISBN: 978-602-6883-90-2

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia Allah swt sehingga sehingga tulisan ini dapat dipersembahkan dalam rangka menambah wawasan keilmuan kita. Shalawaat dan taslim atas junjungan nabi besar Muhammad saw sebagai khatamul albiya wa almursalin sehingga risalah yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan dunia. Amin

Perintah pencatatan perkawinan memang tidak ditemukan secara tekstual dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, namun apabila ditelusuri secara mendalam kalimat **فاكتبوه** pada ayat ke 282 surah Al-Baqarah kemudian mengaitkan tujuan pencatatan pada suatu transaksi muamalah, maka pencatatan dalam perkawinan memiliki pertimbangan yang sama, yaitu kemaslahatan. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi martabat dan kesuciah perkawinan dan menjaga kemaslahatan bagi manusia.

Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan melahirkan konsekwensi hukum yang dapat merugikan masyarakat. Perkawinan yang tidak dicatatakan akan akan menimbulkan praktek poligami, hilangnya hak suami istri mendapatkan pengakuan oleh Negara, bahkan anak yang dilahirkan akan terhalang haknya untuk mendapat kewarisan.

Mewujudkan tata kelola pencatatan perkawinan merupakan amanah Negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh PPN yang bertugas melakukan pengawasan terhadap peristiwa perkawinan. Sehingga tidak ada pihak lain yang dapat mengambil keuntungan yang dapat merugikan masyarakat.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya sehingga nilai-nilai yang di dalamnya tidak bergeser dari substansi persoalan yang dibahas. Semoga Allah swt melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab 1	
A. Makna Tata Kelola	1
B. Tata kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang	4
C. Kajian Perundang-Undangan Tentang Tata Kelola Pencatatan Perkawinan	11
Bab II	
A. Epistemologi Hukum Islam	17
B. Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Pencatatan Perkawinan	26
C. Konsekwensi Hukum Perkawinana yang tidak Tercatat	34
D. Penyebab Perkawinan tidak Dicatat	38
Bab III	
A. Yang Berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan	43
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	50
C. Nikah Sirri dan Isbat Nikah	53
Daftar Pustaka	76

